BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan dan Lokasi

Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY merupakan sebuah provinsi yang dikenal dengan nama kota pelajar. Julukan ini didukung dengan survey Goodstats pada 2024 dengan judul *Kota Pilihan Masyarakat Indonesia 2024* Yogyakarta terpilih sebagai kota terbaik untuk tujuan studi dengan persentase 67,2% (Yonatan, 2024). Citra DIy sebagai kota pelajar tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosialnya khususnya dalam hal kriminalitas. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pasca pandemi Covid-19, terjadi lonjakan angka kriminalitas dari 6.999 kasus pada 2021, menjadi 10.137 pada 2022, dan mencapai 17.909 pada 2023, kenaikannya mencapai lebih dari dua kali lipat hanya dalam kurun waktu tiga tahun. (BPS, 2024)

Kenaikan angka kriminalitas tidak bisa dilepaskan dari tingginya mobilitas dan heterogenitas yang menjadi ciri khas DIY. Heterogenitas tersebut tercermin dari peran DIY sebagai kota pelajar, destinasi wisata, serta tingginya angka migrasi dengan persentase migran neto mencapai 4.1% pada 2020 (Karnadi, 2022). Kondisi ini dimanesfestasikan melalui keragaman etnis, bahasa, budaya, dan gaya hidup yang saling berinteraksi. Walau menghadirkan dinamika positif sebagai "*meeting point*" berbagai latar belakang, keberagaman tersebut juga berpotensi memunculkan konflik maupun segregasi spasial.

Keragaman ini kemudian terlihat dalam perbedaan karakteristik antar kabupaten dan kota di DIY, terutama bila ditinjau dari faktor demografi, ketenagakerjaan, dan konsentrasi perguruan tinggi. Kabupaten dengan jumlah penduduk relatif kecil seperti Kulon Progo dan Gunungkidul hanya memiliki satu perguruan tinggi dengan tingkat pengangguran rendah, sehingga peluang munculnya kasus kriminal relatif kecil. Bantul dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa dan 22 perguruan tinggi menunjukan potensi yang lebih tinggi meskipun masih berada pada tingkat menengah dalam angka kriminalitas. Kota Yogyakarta memiliki perguruan tinggi terbanyak, yaitu 41 institusi, 40,6% dari total DIY, tetapi jumlah penduduknya relatif kecil sehingga risiko kriminalitas lebih terkendali. (BPS DIY, 2024a, 2024b, 2025; LLDIKTI, 2021)

Kabupaten Sleman, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,1 juta jiwa, 36 perguruan tinggi, 35,6% dari total DIY, serta tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya (5,09% pada 2020 dan 4,13% pada 2024), memiliki angka kriminalitas tertinggi di DIY. Tingginya mobilitas dan interaksi sosial, juga arus mahasiswa pendatang yang terus berganti, persaingan kerja, serta kepadatan aktivitas ekonomi menjadi penunjang tingginya kriminalitas. Dengan demikian, indikator demografis, pendidikan, dan ketenagakerjaan mengarahkan analisis pada Sleman sebagai konsentrasi utama kriminalitas di DIY (BPS DIY, 2024a, 2024b, 2025).

Kondisi kriminalitas yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan spasial ini dapat dikaitkan dengan konsep "*The Third Place*". Dalam bukunya The Great Good Space, Ray Oldenburg (2023) memperkenalkan konsep "*Third Place*" yang menekankan pentingnya ruang sosial netral. Ruang ketiga ini bukanlah rumah (*first place*) maupun tempat kerja (*second place*), namun ruang ketiga di mana masyarakat dapat berinteraksi secara sama dan setara tanpa batasan sosial, ekonomi, maupun politik. Menjadikan ruang seperti balai warga dan taman kota diperlukan sebagai perekat sosial dalam sebuah komunitas. Namun seiring perkembangan urban, salah satunya DIY, keberadaan ruang ketiga semakin tergerus dengan komersialisasi ruang. Berbagai ruang yang dulunya gratis kini menjadi berbayar yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu. Fenomena ini menimbulkan krisis ruang publik inklusif dan menaikkan ruang publik eksklusif. Jika terus dibiarkan, ruang publik tidak lagi dapat dinikmati oleh semua orang, menghilangkan arti arsitektur sebagai produk sosial yang harus mampu menjadi ruang yang aman dan terbuka bagi semua kalangan. (Brown, 2019).

Babarsari adalah wilayah yang terletak di Padukuhan Tambakbayan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di wilayah ini terdapat total delapan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Walaupun begitu, Babarsari dikenal dengan sebutan "*Gotham City*", julukan ini didapat karena banyaknya kasus bentrok yang terjadi pada 18 tahun terakhir. Fenomena ini menunjukan adanya kontradiksi antara citra akademik Babarsari dengan reputasinya sebagai kawasan rawan konflik.

Sebagai sebuah kawasan dengan aktivitas bisnis dan perdagangan yang tinggi, Babarsari justru tidak memiliki ruang publik yang netral. Ruang-ruang publik yang ada memiliki eksklusivitas tertentu yang membatasi interaksi sosial yang spontan dan setara, jauh dari konsep "*The Third Place*". Contohnya perpustakaan kampus yang hanya dapat diakses oleh sivitas akademik tertentu, sementara rumah makan atau kafe mensyaratkan transaksi sebagai 'tiket masuk'. Hal ini bertentangan degan kebutuhan masyarakat akan ruang publik netral sebagai commo ground, terutama di kawasan dengan aktivitas dan mobilitas yang tinggi. Ketiadaan ruang publik yang netral atau the third place dapat memberikan dampak buruk terhadap komunikasi antar kelompok di sebuah kawasan, di mana interaksi antar kelompok akan terbatas sehingga konflik lebih mudah untuk tumbuh.

Dalam 18 tahun terakhir, Babarsari kerap menjadi sorotan media karena kasus bentrokan antar kelompok, bentrok antar mahasiswa pada tahun 2007, bentrok antar warga dan mahasiswa tahun 2012, bentrok antara *debt collector* dan mahasiswa tahun 2017, dan keributan di depan karaoke tahun 2022 (Mardiastuti, 2022a). Konflik-konflik tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, namun juga memperkuat stigma Babarsari sebagai kawasan rawan kriminalitas.

Pelaku konflik seringkali berasal dari luar Jogja dan jarang ada warga yang terlibat. Hal ini menimbulkan adanya persepsi negatif di benak warga terhadap orang luar

Jogja. (Tabuni, 2023) Hari Soetjipto , sosiolog UGM menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Babarsari bukanlah pertikaian antar etnis semata, namun juga sebuah perebutan kekuasaan ekonomi antar kelompok. (Leon, 2022). Prof Dr Hamka (2022) menyatakan bahwa permasalahan ini bermula dari komunikasi antar kelompok dan etnis yang belum tercipta dengan baik, sehingga pemantik kecil dapat langsung memperparah suasana (VOI, 2022). Menurut Prof Dr Bagong Suyanto (2022) diperlukan adanya forum pertemuan atau kegiatan yang dapat dilakukan antar pihak yang berkonflik, sehingga konflik tersalurkan ke aktivitas yang dapat ditoleransi (Uniarnews, 2022).

Label “Gotham CIty” pada dasarnya hadir dari akumulasi peristiwa kekerasan yang berulang, dimana ruang-ruang publik yang ada telah gagal menjadi mediator sosial yang netral sehingga konflik diselesaikan di jalanan. Hal ini mencerminkan gejala ketiadaan *common ground* atau ruang bersama yang netral dan inklusif. Ruang publik yang ada justru bersifat eksklusif dan hanya melayani kepentingan organisasi atau individu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi arsitektur yang tidak hanya melihat ruang publik sebagai ‘ruang’, namun juga sebagai wadah interaksi sosial antar komunitas.

Terminologi kebudayaan pada perancangan Cultural Creative Hub difokuskan pada budaya urban kontemporer sebagai representasi demografis kawasan Babarsari. Dinamika budaya urban merupakan bentuk interaksi sosial adaptif di tengah heterogenitas kota (Lefebvre, 1991). Konsep ini sejalan dengan prinsip penyediaan fasilitas budaya inklusif sebagai instrumen sosial dengan tujuan mengurangi ketegangan komunal (United Nations, 2011). Oleh karena itu, pendekatana arsitektur ini diharapkan mampu menciptakan ruang publik netral atau *third place* yang mampu mengkonversi potensi konflik menjadi kegiatan produktif.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang di atas, kawasan Babarsari menunjukan kontradiksi antara julukan kota pelajar dan tingginya angka kriminalitas yang menjadi sebuah kekhawatiran. Dalam 18 tahun terakhir, berbagai bentrok yang terjadi didasari kurangnya komunikasi dan ruang publik yang tidak mampu menjadi wadah penyelesaian konflik. Permasalahan ini memperkuat pemahaman bahwa arsitektur tidak hanya ruang, namun juga wadah yang mampu menjembatani komunikasi antar komunitas. Teori arsitektur inklusif menawarkan kerangka untuk memahami dan mendasari proses perancangan ruang publik inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Oleh karena itu, perancangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga Babarsari akan *Cultural Creative Hub* yang mampu mewadahi interaksi sosial antarwarga dengan latar belakang beragam di kawasan Babarsari, Sleman.

1.3 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu dengan merancang sebuah *Cultural Creative Hub* di Kawasan

Babarsari, Yogyakarta sebagai ruang publik yang netral dan inklusif dengan pendekatan arsitektur inklusif sebagai wadah interaksi sosial antar komunitas.

1.4 Sasaran Perancangan

Agar dapat mencapai tujuan perancangan di atas, dirumuskan sasaran-sasaran perancangan sebagai berikut :

1) Menemukan rumusan permasalahan kawasan Babarsari, Yogyakarta sebagai dasar dan acuan perancangan *Cultural Creative Hub* inklusif
2) Mengumpulkan data primer dan sekunder terkait kawasan Babarsari, peraturan daerah, dan teori arsitektur inklusif.
3) Menganalisis pola keterhubungan antara eksklusivitas ruang publik dan konflik sosial.
4) Mercancang konsep *Cultural Creative Hub* yang netral dan inklusif dengan pendekatan arsitektur inklusif.

1.5 Pendekatan Perancangan

Perancangan *Cultural Creative Hub* di Babarsari, Yogyakarta dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan arsitektur inklusif sebagai dasar dalam memahami kebutuhan ruang pengguna dari berbagai latar belakang. Pendekatan ini menekankan pada perancangan ruang yang tidak hanya berfungsi secara spasial, namun juga merespons kebutuhan sosial dan kultural masyarakat.

1.6 Kontribusi

Perancangan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah kajian mengenai penerapan pendekatan arsitektur perilaku pada ruang publik, khususnya dalam merespons permasalahan eksklusivitas ruang di kawasan heterogen. Hasil kajian diharapkan mampu menjadi refrensi akademis bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan alternatif rancangan *Cultural Creative Hub* yang netral dan inklusif di kawasan heterogen seperti Babarsari, Yogyakarta. Rancangan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan warga akan ruang publik inklusif, serta menginspirasi kebijakan maupun proyek serupa lainnya.

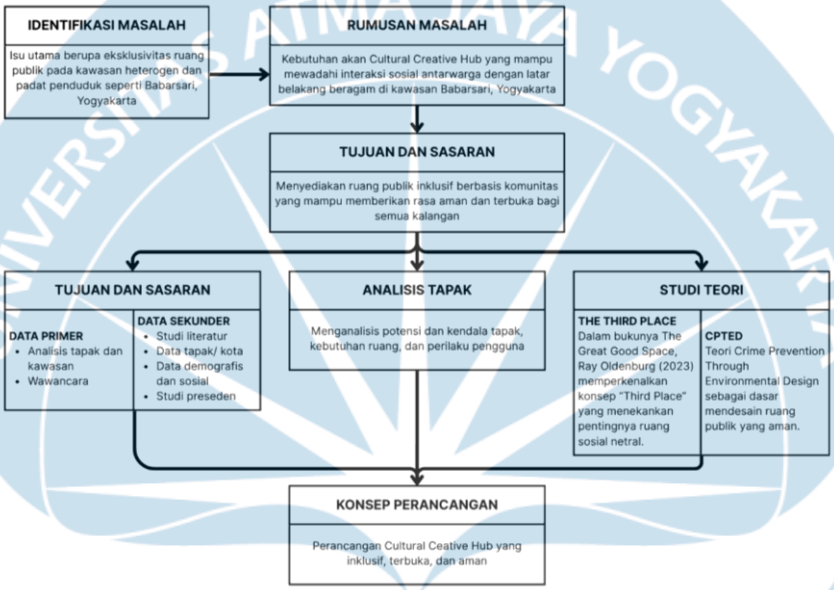
1.7 Sistematika Penulisan

Hasil peracangan akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. **BAB I Pendahuluan** : Penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan lokasi yang menjadi dasar pemilihan topik, pengerucutan permasalahan dan tujuan perancangan, pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam proses perancangan.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka** : Penjelasan mengenai objek desain dan pengertian mengenai teori yang digunakan dalam perancangan. Selain itu, bab ini akan menjelaskan mengenai pendekatan desain dan studi preseden.

3. **BAB III Tinjauan Lokasi** : Memahami lebih lanjut mengenai kawasan amatan, menentukan checklist kebutuhan site, opsi site, dan penentuan site paling sesuai.
4. **BAB IV Metode Perancangan** : Hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang memberikan pengaruh terhadap hasil rancangan.
5. **BAB V Analisis Pelaku, Ruang, dan Matriks Kriteria dan Sistem** : Analisis standar kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sebuah bangunan. Data yang didapat digunakan sebagai acuan desain.
6. **BAB VI Konsep Perancangan** : Penjabaran konsep perancangan dan usulan solusi dari permasalahan yang diangkat.

1.8 Alur Pikir Perancangan dan Penulisan



Gambar I.1 Alur Pikir Perancangan dan Penulisan

1.9 Rencana Survey Perancangan

Percancangan ini menggunakan metode campuran (*mixed-method*) dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan tujuan memperoleh Gambaran yang menyeluruh mengenai kebutuhan ruang public warga Babarsari serta memastikan bahwa kebutuhan tersebut sesuai dengan pola perilaku actual di lapangan.

1.9.1 Pengumpulan Data primer

a. Wawancara
   Wawancara dilakukan kepada narasumber ketua RT/RW Kawasan Babarsari yang telah tinggal cukup lama di Babarsari. Wawancara dilakukan dengan tujuan utama memahami pendapat masyarakat lokal terhadap mahasiswa pendatang.
b. Observasi Lapangan
   Observasi secara langsung ke tapak kawasan untuk memahami lebih lagi mengenai konteks kawasan.

1.9.2 Pengumpulan data sekunder

Selain data primer, data sekunder diperlukan untuk memperkuat analisis, diantaranya meliputi:

- Dokumen RTRW/RDTR Kabupaten Sleman mengenai zonasi dan tata ruang
- Data demografi dan kepadatan penduduk
- Studi literatur teori dan pendekatan arsitektur
- Studi preseden mengenai *Cultural Creative Hub* dan ruang publik inklusif